

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Riview Hasil-hasil Penelitian Terdahulu**

Indriastuti (2012:532) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2013:16) yang hasilnya menyatakan bahwa variabel kepemilikan manajerial (KM) secara statistik menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Kedua penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi S dan Khoiruddin (2016:164) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini dikarenakan dengan kepemilikan saham yang rendah, maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Asward dan Lina (2015:28) mengatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini berbanding ke balik dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriastuti (2012:532), Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini mengartikan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional atau yang disebut juga pemegang saham mayoritas maka semakin banyak pula kesempatan dan insentif untuk mengambil alih sumberdaya perusahaan dengan mengorbankan pemegang saham minoritas. Manajer merasa terikat sehingga untuk memenuhi target laba para investor, manajer cenderung melakukan tindakan manajemen laba.

Dewi S dan Khoiruddin (2016:164), menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Rahmawati (2013:16) menyatakan terdapat pengaruh dewan komisaris independen berpengaruh secara simultan terhadap manajemen laba diterima. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan Asward dan Lina (2013:29) menyatakan dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Karena dewan komisaris akan mengawasi perbuatan laporan keuangan serta

kebijaksanaan yang dibuat manajemen dan melindungi hak-hak pemegang saham untuk mendapatkan laporan keuangan yang murni dan tanpa rekayasa.

Hasil penelitian yang dilakukan Yushita, Rahmawati dan Triatmoko (2013:150) membuktikan bahwa komite audit berpengaruh positif namun tidak signifikan mempengaruhi kualitas laba perusahaan. Penelitian ini berbanding kebalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Tahenmal & Zeynivand (2016:55) *significant negative relationship between the structure of corporate governance discipline include size of the board, not-being bound of the board, the quality of financial information profit*. Hal ini dapat terjadi dikarenakan masih kurangnya komite audit dalam perusahaan, dalam arti lain peran komite audit masih kurang efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Christian dan Nugrahanti (2014:60) membuktikan bahwa ukuran KAP (KAP *big four* dan *non big four*) tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil serupa juga didapatkan tidak hanya di Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Yaseer dan Soliman (2018:226) yang dilakukan di Egypt (Mesir) *Audit firm size and Auditor industry specialization fail to support the argument that auditor can play a role in constraining earnings management practice*. Akan tetapi, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahdal (2017:596) yang menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Semakin besar ukuran KAP yang mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan, dimana terdapat auditor yang memiliki pengalaman dan keahlian yang tinggi maka kemungkinan praktik manajemen laba dalam perusahaan tersebut kecil.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Konsep *agency theory* menurut Anthony dan Govindarajan dalam Siagian (2011:10) adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*, *principal* mempekerjakan *agent* melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, termasuk pendegelasan otorisasi pengambilan keputusan dari *principal* kepada *agent*. Penelitian yang dilakukan oleh Jensen & Meckling (1976:4) menyatakan bahwa hubungan keagenan muncul ketika satu atau lebih *principal* mempekerjakan *agent*

untuk memberikan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut, dengan demikian, seorang *agent* wajib untuk mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan oleh *principal* kepadanya. Pada perusahaan, hubungan antara *principal* dan *agent* diwujudkan dalam hubungan antara pemegang saham dan manajer, pemegang saham berperan sebagai *principal* sementara manajer berperan sebagai *agent*.

Dalam penelitian ini teori keagenan sangat mendukung dengan variable – variabel yang akan diteliti, diantaranya yang pertama adalah variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan manajerial merupakan salah satu cara untuk mengurangi masalah keagenan, hal ini dikarenakan kepemilikan manajerial merupakan alat pengawasan terhadap kinerja manajer yang bersifat internal. Variabel kedua adalah kepemilikan institusional, kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor pihak manajemen, karena akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal dan tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham. Dan variabel ketiga adalah komite, komite audit memberikan kepastian bahwa perusahaan telah tunduk terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku serta melakukan kontrol yang efektif terhadap konflik kepentingan yang akan merugikan perusahaan dan menurunkan nilai perusahaan.

### **2.2.2 Teori Persinyalan (*Signalling Theory*)**

Teori sinyal pertama kali diperkenalkan oleh Spence di dalam penelitiannya yang berjudul *Job Market Signaling*, Spence (1973:357) mengemukakan bahwa isyarat atau signal memberikan suatu sinyal, pihak pengirim (pemilik informasi) berusaha memberikan potongan informasi relevan yang dapat di manfaatkan oleh pihak penerima, pihak penerima kemudian akan menyesuaikan perilakunya sesuai dengan pemahamannya terhadap sinyal tersebut. Menurut Brigham dan Hosuton (2014:184) *signaling theory* merupakan suatu perilaku manajemen perusahaan dalam memberi petunjuk untuk investor terkait pandangan manajemen terhadap prospek perusahaan untuk masa mendatang.

Dalam kerangka teori sinyal disebutkan bahwa dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara manajer perusahaan dan pihak luar, hal ini disebabkan karena manajer perusahaan

mengetahui lebih banyak informasi mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar. Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan signal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi, jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar (Jogiyanto, 2012:392).

Salah satu informasi yang wajib untuk diungkapkan oleh perusahaan adalah informasi tentang *corporate social responsibility*. Informasi ini dapat dimuat dalam laporan tahunan atau laporan sosial perusahaan terpisah. Perusahaan melakukan pengungkapan *corporate social responsibility* dengan harapan dapat meningkatkan reputasi dan nilai perusahaan (Rustiarini, 2010:3).

### **2.2.3 Pengertian Good Corporate Governance**

Pengertian *corporate governance* menurut para ahli, sebagai berikut:

Sukrisno Agoes (2011:101), *corporate governance* adalah suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. *Corporate governance* juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.

Tunggal (2012:24), *corporate governance* adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholders, karyawan dan masyarakat sekitar.

Ardeno Kurniawan (2012:27), *corporate governance* adalah seperangkat hubungan yang terjadi antara manajemen, direksi, pemegang saham, dan stakeholder-stakeholder lainnya seperti pegawai, kreditor, dan masyarakat.

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan *corporate governance* adalah system yang mengatur hubungan antara karyawan, kreditor serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern dalam mengendalikan perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan.

#### **2.2.4 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance***

Nasional Committe and Governance dalam Sukrisno dan Ardana (2013:103) mengemukakan lima prinsip corporate governance, yaitu :

1. **Transparansi (*Transparency*)**  
Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
2. **Akuntabilitas (*Accountability*)**  
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.
3. **Responsibilitas (*Responsibility*)**  
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat atau lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate governance*.
4. **Independensi (*Independency*)**  
Untuk melancarkan pelaksanaan corporate governance perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. **Kesetaraan (*Fairness*)**  
Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

#### **2.2.5 Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance***

Tujuan dan manfaat good corporate governance menurut Surya dan Ivan dalam Sukrisno dan Ardana (2013:106) yaitu :

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
2. Mendapatkan biaya modal (*cost of capital*) yang lebih murah.
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.

4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

#### **2.2.6 Mekanisme *Good Corporate Governance* (Independent Variabel)**

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan seluruh mekanisme *corporate governance* yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit.

#### **2.2.7 Kepemilikan Manajerial**

Pengertian kepemilikan manajerial menurut para ahli, sebagai berikut :

Majid (2016:4), kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan, misalnya direktur dan komisaris.

Pasaribu, Topowijaya dan Sri (2016:156), kepemilikan manajerial adalah pemilik atau pemegang saham oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif berperan dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Tjeleni (2013:137), kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham.

Mahadewi dan Krisnadewi (2017:447), kepemilikan manajerial adalah tingkat kepemilikan saham yang mana pihak manajemen secara aktif ikut serta dalam pengambilan keputusan, diukur oleh proporsi saham yang dimiliki manajer pada akhir tahun yang dinyatakan dalam %.

Dari definisi kepemilikan manajerial di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan saham yang dimiliki oleh manajer yang dinyatakan dalam % sehingga manager sekaligus sebagai pemegang saham.

#### **2.2.8 Metode Pengukuran Kepemilikan Manajerial**

Sukirni (2012:5) mengatakan bahwa kepemilikan manajerial diukur dengan menggunakan indikator jumlah presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dari seluruh jumlah modal saham yang beredar.

Menurut Riduwan dan Sari (2013) dalam Dewi dan Nugrahanti (2014:70). Pengukuran kepemilikan manajerial dirumuskan sebagai berikut :

$$KM = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki manajemen}}{\text{Jumlah saham beredar}} \times 100\%$$

### **2.2.9 Kepemilikan Institusional**

Pengertian kepemilikan institusional menurut para ahli, sebagai berikut:

Widarjo (2010:25), kepemilikan institusional adalah kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa institusi pemerintah, institusi swasta, dan asing.

Nabela (2012:2), kepemilikan institusional adalah proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun yang diukur dengan persentase.

Nuraina (2012:116), kepemilikan institusional adalah presentase saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, dana pensiunan, atau perusahaan lain).

Dari definisi kepemilikan institusional di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional merupakan persentase kepemilikan saham oleh pihak institusi yang dapat digunakan untuk mengontrol kinerja manajemen dalam perusahaan.

### **2.2.10 Metode Pengukuran Kepemilikan Institusional**

Sukirni (2012:5) mengatakan bahwa kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan indikator jumlah presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi dari seluruh jumlah modal saham yang beredar. Pengukuran kepemilikan institusional mengacu pada Riduwan dan Sari (2013) dalam Dewi dan Nugrahanti (2014:70) sebagai berikut :

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham institusi}}{\text{Jumlah total saham}} \times 100 \%$$

### 2.2.11 Komisaris Independen

Pengertian komisaris independen merupakan anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Komisaris independen di Indonesia menggunakan sistem two tier, yang terdiri dari dewan komisaris dan dewan direksi. Secara umum, dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggungjawab untuk mengawasi kualitas informasi yang ada pada laporan keuangan. Dewan komisaris merupakan organ per-usahaan yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan penuh atas pengurusan perusahaan (Indriastuti, 2012:533)

### 2.2.12 Metode Pengukuran Komisari Independen

Melalui fungsi monitoring atau sebagai pengawas manajemen di perusahaan, komisaris independen memiliki peranan yang besar dalam membatasi tingkat manajemen laba, karena pengawasan yang dilakukan lebih baik dan bebas dari kepentingan intern perusahaan. Riduwan dan Sari (2013) dalam Dewi dan Nugrahanti (2014:70), pengukuran dewan komisaris independen dihitung dengan cara sebagai berikut

$$KI = \frac{\text{jumlah komisaris independen}}{\text{jumlah komisaris}} \times 100\%$$

### 2.2.13 Komite Audit

Dalam Effendi (2016:59-60) Komite audit hendaknya dapat melakukan komunikasi secara efektif dengan komisaris, direksi, maupun auditor internal dan eksternal. Salah satu fungsi komite audit adalah menjembatani antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan kegiatan pengendalian yang diselenggarakan oleh manajemen, serta auditor internal dan eksternal, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melakukan rapat internal secara rutin dengan dewan komisaris dan manajemen.

Dari definsi komite audit diatas dapat disimpulkan bahwa komite audit merupakan komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris yang bertugas membantu dewan komisaris.



### 2.2.14 Metode Pengukuran Komite Audit

Jao (2011:47), mengatakan bahwa komite audit diukur dengan menggunakan :

$$\text{Komite Audit} = \text{Jumlah Anggota Rapat dalam Satu Tahun}$$

Sedangkan menurut Pujiningsih (2011:35), komite audit dapat diukur dengan menggunakan :

$$\text{Komite Audit} = \text{Jumlah Anggota Komite Audit di Perusahaan}$$

### 2.2.15 Ukuran KAP (Variabel Dummy)

Audit merupakan sebuah proses yang digunakan untuk mengurangi terjadinya ketidaksielarasan antara *principal* dan agen dengan cara menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan (Sari, 2016:7). Dengan begitu calon investor maupun kreditor mempunyai informasi yang tidak menyesatkan mengenai prospek perusahaan dimasa yang akan datang (Saffudin dan Prasetyono, 2012). Pemilihan auditor eksternal yang tepat tentu akan menjamin independensi dan profesionalisme dari auditor tersebut.

Ukuran KAP yang baik juga akan menjembatani *stakeholder* untuk memperoleh informasi yang akurat dan dapat mengurani adanya permasalahan keagenan yaitu asimetri informasi (Susanto, 2009:17), sehingga dalam pengambilan keputusan sangat kecil adanya kesalahan. Perusahaan dengan biaya keagenan yang tinggi akan menggunakan KAP dengan kualitas yang baik juga (Jensen dan Meckling, 1976). Contoh dari KAP yang berkualitas ialah KAP yang masuk dalam jajaran KAP *big- 4*.

Berikut merupakan daftar dari KAP *Big-4* yang ada di dunia dan KAP afiliasinya di Indonesia:

1. *Price Water House Coopers*
2. Deloitte touch tohmatsu
3. *Ernest and Young*
4. KPMG

Sedangkan untuk KAP di Indonesia yang berafiliasi dengan KAP *big four* yaitu:

1. KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja (Berafiliasi dengan *Ernest and Young*)
2. KAP Osman Bing Satrio ( Berafiliasi dengan Delloite)
3. KAP Sidharta Wijaya ( Berafiliasi dengan KPMG)
4. KAP Tanudiredja, wibisana, Rintis, & Rekan (berafiliasi dengan *Price Waterhouse Cooper*)

Apabila sebuah perusahaan di audit oleh KAP *big four* , maka perusahaan akan hanya memiliki sedikit celah untuk melakukan praktik manajemen laba, hal ini dikarenakan KAP yang berkualitas akan cenderung mendorong perusahaan untuk mengungkapkan lebih luas informasinya, KAP akan sebisa mungkin untuk mengungkap informasi dari perusahaan untuk mempertahankan reputasi dari KAP dan juga menghindari biaya yang akan timbul dari biaya reputasi.

#### **2.2.16 Manajemen Laba (*Dependent Variabel*)**

Manajemen laba merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dengan tujuan untuk menghasilkan informasi laba yang lebih baik (Ningsih, 2017:1). Manajemen laba merupakan tindakan yang dilakukan manajemen ketika proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat meratakan, menaikkan, dan menurunkan pelaporan laba, dimana manajemen dapat menggunakan kelonggaran penggunaan metode akuntansi, membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mempercepat atau menunda biaya-biaya dan pendapatan agar laba perusahaan lebih kecil atau lebih besar sesuai yang diharapkan. Praktek manajemen laba memiliki 2 (dua) sifat utama yaitu efisien dan oportunistik yang artinya sangat berkaitan erat dengan masalah keagenan, dimana perusahaan selalu ingin tampil menarik di hadapan pemangku kepentingan (Herawaty, 2009:18). Ada beberapa faktor yang memicu manajemen untuk melakukan manajemen laba diantaranya sebagai berikut.

1. Motivasi Bonus

Dalam sebuah perjanjian bisnis, pemegang saham akan memberikan sejumlah insentif dan bonus sebagai *feedback* atas kinerja manajer dalam

menjalankan perusahaan. Manajer biasanya akan menerima bonus yang besar apabila kinerja manajer telah mencapai area pencapaian bonus yang ditetapkan pemegang saham. Kinerja manajemen salah satunya diukur dari pencapaian laba perusahaan. Pemberian bonus atas pencapaian laba perusahaan tersebut membuat manajer termotivasi untuk membeirkan performa terbaiknya sehingga tidak menutup kemungkinan manajer melakukan manajemen laba agar dapat menampilkan kinerja yang baik agar mendapatkan bonus yang dijanjikan oleh pemegang saham.

## 2. Motivasi Hutang

Selain melakukan kontrak bisnis dengan pemegang saham, untuk kepentingan ekspansi perusahaan, manajer seringkali melakukan kontrak bisnis dengan pihak ketiga yaitu kreditor. Agar kreditor mau menginvestasikan dananya ke perusahaan, tentunya manajer akan berusaha menampilkan kinerja perusahaan yang maksimal. Pada saat seperti inilah inisiatif manajer untuk melakukan manajemen laba keluar agar lebih mudah menarik minat kreditor.

## 3. Motivasi politik

Motivasi yang terakhir ini biasanya terjadi pada perusahaan besar yang bidang usahanya banyak menyentuh masyarakat luas, seperti perusahaan perminyakan, gas, listrik, dan air. Demi menjaga tetap mendapat subsidi dari pemerintah perusahaan tersebut cenderung menjaga posisi keuangannya dalam keadaan tertentu sehingga prestasi atau kinerjanya tidak terlalu baik, hal ini dilakukan karena jika kinerja perusahaan baik maka subsidi dari pemerintah tidak dapat diberikan kepada perusahaan. Ketika peristiwa seperti itu terjadi manajer cenderung akan melakukan manajemen laba dengan menyajikan laba yang lebih rendah dari nilai sebenarnya.

Dalam mendeteksi terjadinya manajemen laba, banyak model yang dapat digunakan untuk mengukurnya, salah satu model yang digunakan untuk mengukur manajemen laba kuantitatif ialah *modified jones model* (1995), dimana mengamsusikan bahwa akrual nondiskreosioner bersifat tetap dari satu periode ke periode lainnya sehingga perubahan akrual yang terjadi karena adanya perubahan akrual dikresioner. Hal ini terjadi karena manajemen memiliki motivasi untuk melakukan permainan terhadap kebijakan akuntansi. Dengan begitu, apabila

ada suatu perubahan di suatu pos tertentu maka manajemen semakin termotivasi untuk melakukan perubahan pada pos lainnya (Sulistiawan *et al.*, 2011:18). Apabila pada hasil akrual diskresioner menunjukkan hasil yang besar maka dapat diketahui perusahaan cenderung menaikkan laba perusahaan sedangkan hasilnya semakin negatif maka cenderung menurunkan laba

Manajemen laba dapat menyebabkan investor tidak menerima apa yang mereka harapkan diawal yaitu *return*. Hal ini bisa saja tidak terjadi apabila investor tidak mengetahui adanya praktik manajemen laba sehingga membuat *return* yang diterima lebih rendah. Oleh karena itu *return* dinilai dapat menarik investor untuk berinvestasi (Beylin, 2010:55).

### **2.2.17 Strategi Manajemen Laba**

Menurut Subramanyan dan Wild (2010:133-134) terdapat tiga jenis strategi manajemen laba yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode kini untuk membuat perusahaan dipandang lebih baik. Cara ini juga memungkinkan peningkatan laba selama beberapa periode. Perusahaan juga dapat melakukan manajemen laba untuk meningkatkan laba selama beberapa tahun dan membalik akrual sekaligus pada satu saat pembenahan. Pembenahan satu saat ini sering kali dilaporkan *below the line* yang artinya dibawah laba bersih sehingga dipandang tidak terlalu relevan.
2. Strategi *Big Bath* dilakukan melalui penghapusan sebanyak mungkin pada satu periode. Periode yang dipilih biasanya periode dengan kinerja perusahaan yang buruk atau peristiwa saat terjadi pada kejadian yang tidak biasa seperti perubahan manajer, *merger*, atau restrukturisasi. Strategi ini juga biasa dilakukan setelah strategi peningkatan laba pada periode sebelumnya. Oleh karena itu *big bath* yang tidak terulang memberikan kesempatan untuk menghapus semua dosa masa lalu dan memberikan kesempatan untuk meningkatkan laba di masa depan.
3. Perataan Laba merupakan bentuk umum manajemen laba. Manajer meningkatkan atau menurunkan laba yang dilaporkan untuk mengurangi fluktuasinya. Tidak melaporkan bagian laba pada periode baik dengan

menciptakan cadangan atau “bank” laba dan kemudian melaporkan laba ini saat periode buruk termasuk perataan laba.

### **2.2.18 Metode Manajemen Laba**

Menurut Subramanyan dan Wild (2010:131-132) terdapat dua metode utama manajemen laba, yaitu :

1. Pemindahan laba merupakan manajemen laba dengan memindahkan laba dari satu periode ke periode lainnya. Pemindahan laba dapat dilakukan dengan mempercepat atau menunda pengakuan pendapatan dan beban. Bentuk manajemen laba ini biasanya menyebabkan dampak pembalik pada satu atau beberapa periode masa depan, sering kali satu periode berikutnya.
2. Laba juga dapat ditentukan dengan cara khusus mengklarifikasi beban dan pendapatan pada bagian tertentu laporan laba rugi. Bentuk umum dari manajemen laba melalui klasifikasi adalah pemindahan beban dibawah garis, atau melaporkan beban pada pos luar biasa dan tidak berulang, sehingga tidak dianggap penting oleh analisis.

## **2.3. Pengaruh Antar Variabel Penelitian**

### **2.3.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba**

Kepemilikan manajerial adalah saham yang dimiliki oleh manajer secara pribadi maupun saham yang dimiliki oleh anak cabang perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya, investor institusional dan manajemen memiliki sifat intesif yang kuat untuk mendapatkan informasi prapengungkapan mengenai perusahaan untuk memenuhi tanggungjawab serta untuk meningkatkan kinerja mereka.

Manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Hasil penelitian dari Wulandari dan Budiarta (2014:582) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Asward dan Lina (2015:29) kepemilikan manajerial (KM) memiliki koefisien regresi sebesar 0.015 yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif

terhadap manajemen laba. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub> : kepemilikan manajerial berpengaruh tidak terhadap manajemen laba.**

### **2.3.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba**

Melalui mekanisme kepemilikan institusional, efektivitas pengelolaan sumber daya perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang dihasilkan melalui reaksi pasar atas pengumuman laba. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses *monitoring* secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba.

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses *monitoring* secara efektif sehingga dapat mengurangi manajemen laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen. Penelitian Christiani dan Christiawan (2013:16) menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, dengan demikian adanya kepemilikan saham oleh institusi tidak dapat mengurangi aktivitas manajemen laba. Tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan, sehingga akan mengurangi perilaku *oportunistic* atau me-mentingkan diri sendiri. Berdasarkan uraian di atas maka perumusan hipotesis menurut peneliti adalah:

**H<sub>2</sub> : kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba.**

### **2.3.3 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Manajemen Laba**

Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Keberadaan komisari independen dalam perusahaan berfungsi sebagai penyeimbang dalam pengambilan keputusan guna memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan, Guna dan Herawati (2010:58).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 mengatur proporsi dewan komisaris independen sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota dewan komisaris. Proporsi dewan komisaris dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas atau kemungkinan terhindar dari manajemen laba. Hasil penelitian Ayu (2012:168) membuktikan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh pada manajemen laba dapat diterima dan didukung secara statistik dan signifikan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dari Barus dan Setiawan (2015:38) yang menyatakan bahwa proposi dewan komisaris independen bukanlah faktor yang dapat dan sangat dipertimbangkan dalam tindakan manajemen laba yang dilakukan pihak manajemen perusahaan. Kuatnya pengaruh yang dimiliki oleh pendiri perusahaan dan kepemilikan saham mayoritas mengakibatkan dewan komisaris menjadi tidak independen dan fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi tanggungjawabnya menjadi tidak efektif. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

**H<sub>3</sub> : dewan komisaris berpengaruh terhadap aktivitas manajemen laba.**

#### **2.3.4 Pengaruh Komite Audit Terhadap Manajemen Laba**

Tujuan dari keberadaan komite audit di perusahaan yaitu memberikan kepastian bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta disajikan secara wajar dan tidak menyesatkan. Hasil penelitian Yushita dan Triatmoko (2013:152) membuktikan komite audit tidak berpengaruh dalam mempengaruhi kualitas laba perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi S dan Khoiruddin (2016:163) yang mengungkapkan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Asward dan Lina (2015:30) Ukuran komite audit (UKA) memiliki koefisien

regresi sebesar 0.007 yang menunjukkan bahwa ukuran komite audit memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba

Hal ini menunjukkan keberadaan komite audit sebagai bagian penting dari GCG tidak mampu mengurangi aktivitas manajemen laba. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang di ajukan sebagai berikut :

**H<sub>4</sub> : komite audit berpengaruh terhadap aktivitas manajemen laba.**

### **2.3.5 Pengaruh Ukuran KAP Terhadap Manajemen Laba**

Manajemen laba timbul diawali dengan adanya perbedaan informasi antara *stakeholder* dan manajer dalam mengelola keuangan perusahaan. Namun hal-hal seperti ini dapat diminimalisir dengan bantuan dari pihak ketiga yang bersifat netral yaitu auditor. Laporan keuangan dibutuhkan yang memiliki kredibilitas yang tinggi, sehingga informasi yang dibutuhkan oleh pihak eksternal maupun internal sebagai pengambilan keputusan dapat memberikan pertimbangan yang baik. Untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan tersebut, maka diperlukan kualitas audit yang baik, dimana kualitas di sama ratakan dengan menggunakan ukuran auditor *big four* dan *non big four*.

Ukuran KAP merupakan suatu kemampuan auditor untuk menunjukkan sikap independen dan melaksanakan audit secara profesional (Sari, 2016:10). KAP yang terpercaya mampu mendeteksi peristiwa yang dialami perusahaan yang tidak dijelaskan dalam laporan keuangan. Hal ini bisa terjadi karena KAP yang lebih besar akan memiliki pengetahuan, pengalaman, reputasi serta dorongan yang lebih tinggi kepada perusahaan agar mampu memberikan informasi yang sebenarnya kepada KAP.

Cristiani dan Nugrahanti (2014:60) menemukan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, hal ini terjadi karena manajemen benar-benar ingin melakukan manipulasi data agar terlihat baik di investor dengan mengabaikan keberadaan auditor. Akan tetapi penelitian yang dilakukan Yaseer dan Soliman (2018:226) menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh dan dapat membatasi praktik manajemen laba. Berdasarkan rumusan tersebut maka hipotesis yang dirumuskan :

**H<sub>5</sub> : Ukuran KAP berpengaruh terhadap manajemen laba**



### **2.3.6 Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* dan Ukuran KAP terhadap Manajemen Laba**

Manajemen laba timbul sebagai dampak persoalan keagenan yaitu terdapat perbedaan kepentingan antara pemilik saham dan manajerial. Jensen dan Meckling (1976:6) menyatakan bahwa hal tersebut dapat dibuat menjadi sangat minimal dengan mekanisme *monitoring* yang memiliki tujuan untuk menyamakan kepentingan antara pemilik dan manejer. Mekanisme *Good Corporate Governance* dapat diartikan sebagai aturan, prosedur, dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dan pihak yang mengawasinya.

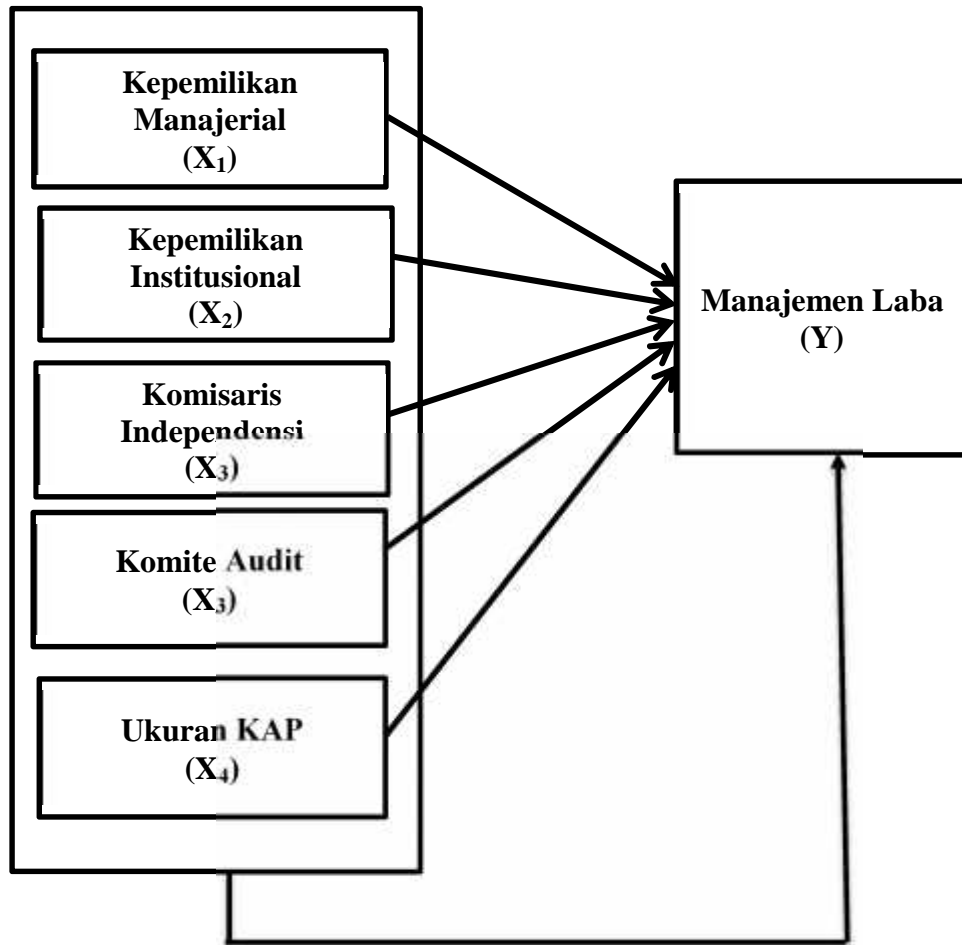
Ukuran KAP menunjukkan kemampuan auditor dalam melakukan audit dan melaksanakan sikap *independensi* dalam melaksanakan audit secara profesional (Rahdal 2017:588). KAP *Big Four* diyakini memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan dengan KAP *Non Big Four*.

Berdasarkan rumusan diatas rumusan diatas maka hipotesis yang dirumuskan :

**H<sub>6</sub> : Mekanisme GCG dan Ukuran KAP berpengaruh terhadap Manajemen Laba.**

### **2.4. Kerangka Konseptual Penelitian**

Penelitian ini mempunyai 4 variabel bebas (*independent variabel*) yakni kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisar independensi, dan komite audit, serta memiliki 1 variabel dummy yaitu ukuran KAP serta memiliki 1 variabel terikat (*dependent variabel*) yaitu manajemen laba. Dapat digambarkan suatu kerangka konseptual penelitian sebagai berikut :



**Gambar 2.1.**  
**Kerangka Konseptual Penelitian**

**Gambar 2.1** menjelaskan bahwa adanya pengaruh kepemilikan manjerial dengan manajemen laba, kepemilikan institusional dengan manajemen laba. Komisaris independent dengan manajemen laba, komite audit dengan manajemen laba juga ukuran KAP dengan manajemen laba, dan mekanisme GCG dan ukuran KAP secara bersamaan berpengaruh terhadap manajemen laba.